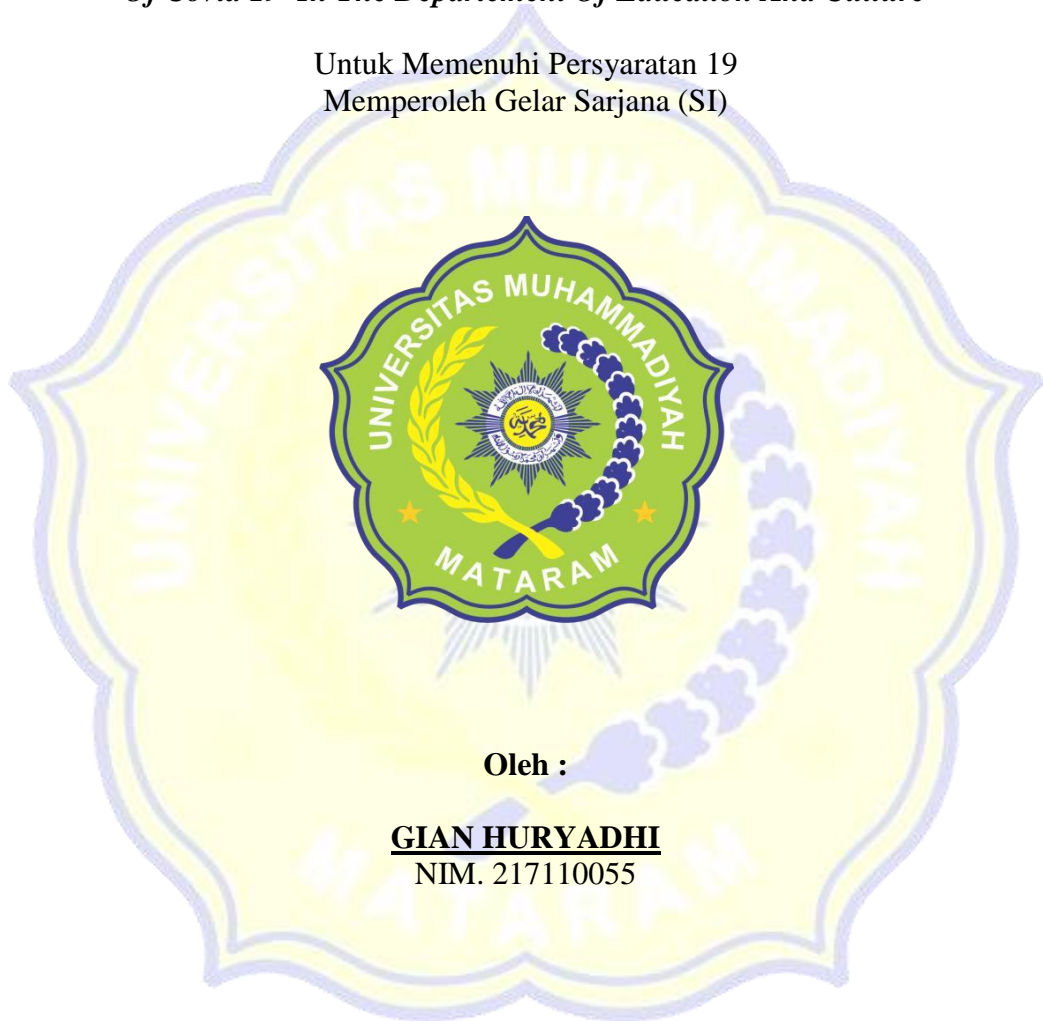


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NO. 4 PADA MASA  
PANDEMI COVID 19 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

*Education Policy In West Nusa Tenggara Barat During The Pandemic Period  
Of Covid 19 In The Departement Of Education And Culture*

Untuk Memenuhi Persyaratan 19  
Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



Oleh :

**GIAN HURYADHI**  
NIM. 217110055

**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**IPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NO 4**  
**PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NUSA**  
**TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

Oleh:

**GIAN HURYADHI**

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi  
Tanggal 15 Februari 2021

Menyetujui  
**Pembimbing**

Pembimbing I



Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos.,M.Si.  
NIDN.0815118302

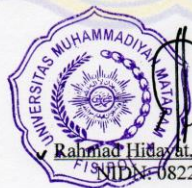
Pembimbing II



M. Ulhatus Akbar Jafar, S.AP.,M.IP  
NIDN.0809039203

Mengetahui,

**Ketua Prodi Program Administrasi Publik**



Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP  
NIDN: 0822048901

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NO 4 PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020.**

Oleh:

**GIAN HURYADHI**  
NIM. 217110055

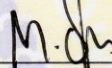
Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal 15 Februari 2021  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si.**  
NIDN.0815118302

()  
Ketua


2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP.**  
NIDN.0809039203

()  
Anggota

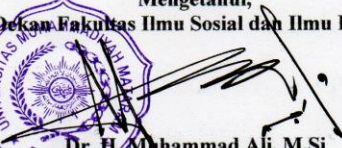
3. **Mardiah, S.Sos., M. Si**  
NIDN.0804117201

()  
Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik

()  
✓ **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
NIDN: 0822048901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

()  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 15 Februari 2021  
Mahasiswa,



GIAN HURYADHI  
217110055



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIAN HURYADHI  
NIM : 217110055  
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 30 DESEMBER 1996  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
No. Hp/Email : 087.761.504.591 / huryadhi@gmail.com  
Judul Penelitian : -

"Implementasi Kebijakan Pendidikan No 4 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2020"

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** *UG*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 MARET 2021

Penulis

  
**GIAN HURYADHI**  
NIM. 217110055

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
MIDN. 0802048904





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIAN HURYADHI  
NIM : 217 110055  
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 30 DESEMBER 1996  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
No. Hp/Email : 087 761 504 541 / huryadhi@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NO.4 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020."

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 08 MARET 2021

Penulis

  
GIAN HURYADHI  
NIM 217 110055

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos, M.A.  
NIDN 0802048904

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya Ilmiah ini saya persembahkan:

Kepada diri saya sendiri kemudian Kepada kedua orang tua saya bapak Jaswadhi dan ibu Nurul Aini dan kakak saya M. Rian Handhika dan Adik saya Ninda Yani, Dhio Wahyu Ditya yang memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Berterimakasih juga buat sahabat-sahabat saya yang selalu memberi do'a, semangat motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Administrasi Publik dan Almamater tercinta. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian persembahan yang dapat disajikan, semoga Allah SWT akan selalu senantiasa memberikan rahmat serta hidayah kebahagiaan.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S. AP., M.AP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mataram, 15 Februari 2021

**GIAN HURYADHI**

NIM. 217110055



## MOTO

“Jika Allah kabulkan doaku maka aku bersyukur, tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku lebih bersyukur lagi. Sebab doaku adalah pilihanku selebihnya pilihan-Nya.”

Hg\_



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan No 4 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2020”. Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak lain berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa adanya dukungan dan motivasi dari mereka, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon dimaafkan dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NO. 4 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

Gian Huryadhi<sup>1</sup>, Siti Atika Rahmi<sup>2</sup>, Ulfatul Akbar Jafar<sup>3</sup>  
Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing<sup>2</sup>, Pembimbing Utama<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

## **ABSTRAK**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) NTB dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 di Dikbud NTB., faktor pendukung dan penghambat dalam proses kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 di Dikbud NTB. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan mengorganisasikan data ketika melakukan wawancara dan observasi dilapangan sesuai kebutuhan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Dikbud NTB diinformasikan melalui surat edaran yang disampaikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota kemudian ditembuskan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota dan seluiruh satuan kepala pendidikan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan ini telah tercukupi baik dari jumlah dan keahlian, sumber daya anggaran telah tercukupi dengan jumlah Rp. 129 Milyar, anggaran ini digunakan sebagai peralatan kebutuhan sekolah dari rumah seperti kuota internet. Informasi terkait kebijakan diinformasikan melalui kepala sekolah yang menghimbau kepada wali murid. Disposisi para pembuat kebijakan memiliki kekuatan yang tepat untuk menjalankan kebijakan, seperti menteri pendidikan, gubernur, bupati/walikota dan kepala sekolah memiliki posisi yang kuat untuk menjalankan kebijakan yang ada. Struktur birokrasi juga sudah tepat sehingga implementasi kebijaka pendidikan pada masa covid 19 berjalan dengan lancar. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan pada masa pandemic covid-19 di Dikbud NTB yakni tidak maksimalnya pembelajaran dari rumah dan kurangnya efektifitas dan efisiensi waktu dikarenakan orang tua siswa yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring, minimnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran daring yang berdampak pada minimnya pemahaman siswa akan materi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Disamping itu juga kendala kuota sinyal internet yang kurang memadai terutama yang berada di desa-desa, tentunya sangat sulit untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut.

**Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan, Pembelajaran Daring**



**EDUCATION POLICY IN WEST NUSA TENGGARA DURING THE  
PANDEMIC PERIOD OF COVID 19 IN THE DEPARTMENT OF  
EDUCATION AND CULTURE**

Gian Huryadhi<sup>1</sup>, Siti Atika Rahmi<sup>2</sup>, Ulfatul Akbar Jafar<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Supervisor<sup>2</sup>, Main Advisor<sup>3</sup>  
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram

**ABSTRACT**

The aim of this study was to learn about the implementation of educational policies in the NTB Education and Culture Office (DIKBUD) during the Covid-19 pandemic, as well as the supporting and inhibiting factors in the educational policy process during the Covid-19 pandemic in the Dikbud of NTB. Qualitative analysis is used in this study. Interviews, observation, and reporting are used as data collection tools. Although conducting interviews and field observations as needed, the data analysis technique is by organizing the data.

The findings of this study show that during the covid-19 pandemic, the NTB Education and Culture Office was told of the implementation of education policies through a circular sent to the governor, regent, and mayor, which was then copied to all heads of regional, district, or city education offices, as well as all heads of education. Human resources were adequate in terms of both number and experience in the implementation of this program, and budget resources were sufficient in the sum of Rp. 129 billion, which was used to purchase equipment for school needs from home, such as internet quotas. Details about policies is conveyed by the principal, who then tells the student's guardian. Policymakers with the authority to enact legislation, such as the minister of education, governors, regents/mayors, and school principals, are in a good position to do so. The bureaucratic framework is also right, ensuring that education policies are implemented smoothly during the Covid-19 era. Inhibiting Factors for Education Policy Implementation in the NTB Education and Culture Office During the Covid-19 Pandemic, namely, bad learning at home and a lack of efficacy and productivity due to students' parents' busy schedules, preventing them from accompanying their children through the online learning process, students' lack of enthusiasm for engaging in online learning, which leads to students' lack of comprehension of the content offered by the instructor. Furthermore, there is an insufficient internet signal quota issue, especially in villages, making it difficult to follow this online learning.

**MENGESAHKAN**  
BALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
  
Humaira, W.Pd  
NIDN. 0003048E01

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISONALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Landasan Teori .....	17
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	17
2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	27
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan.....	29
2.3 Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Pemilihan Informan .....	34
3.4 Sumber dan Jenis Data .....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Teknik Analisa Data .....	36
3.7 Uji Validitas Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	39
4.2 Hasil Dan Pembahasan .....	43
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.....	43

4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 di DIKBUD NTB .....	55
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1	Kesimpulan .....	58
5.2	Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>62</b>





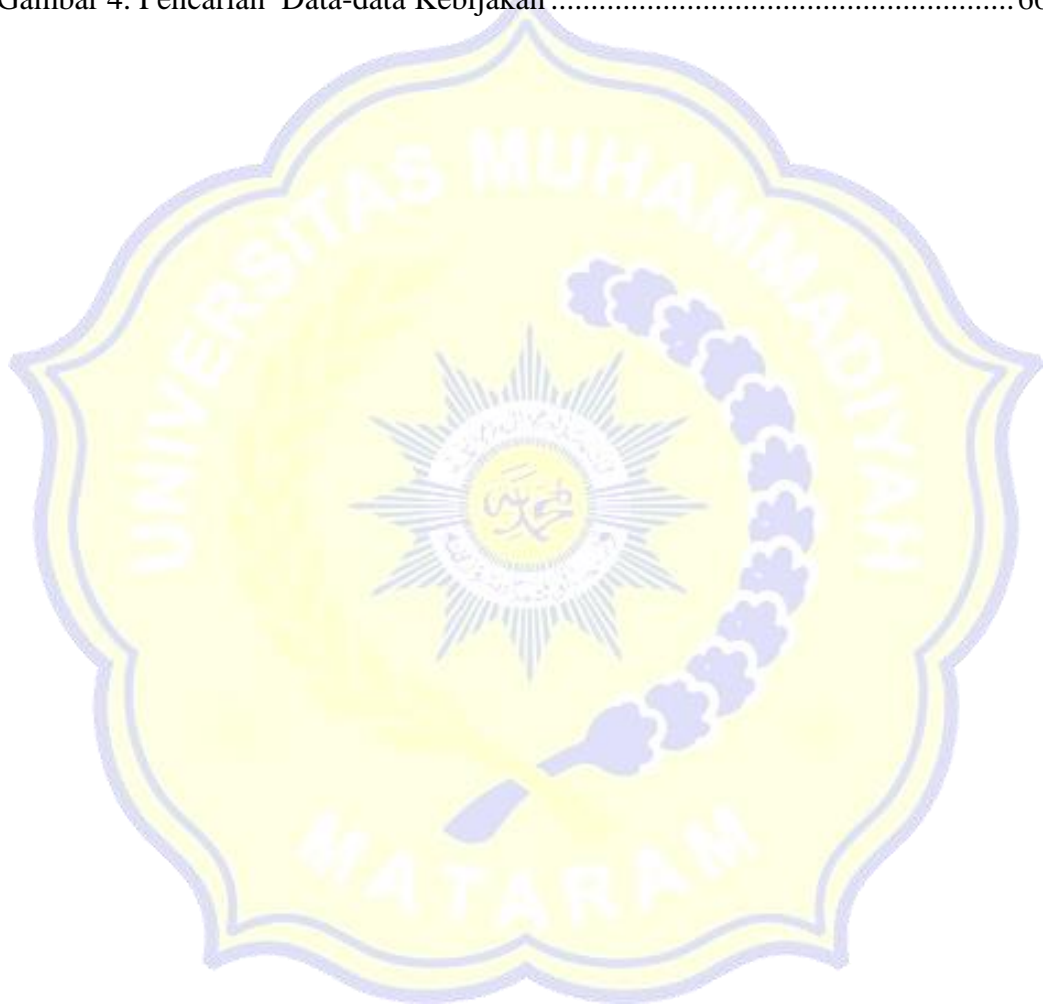
## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Diskominfo NTB ( Gugus Tugas Covid-19 – Provinsi NTB)</i> .....	8
Tabel 2. Data Covid Tanggal 06 Januari 2021.....	9
Tabel 3. Penelitian Terdahulu .....	16



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DIKBUD NTB.....	41
Gambar 2. Surat Edaran Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19.....	62
Gambar 3. Wawancara dengan Kasi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat.....	65
Gambar 4. Pencarian Data-data Kebijakan.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Konsultasi Skripsi.....	67
Berita Acara .....	69
Suran Permohonan Ijin Penelitian.....	74





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan peserta didik menjadi generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis yang mampu merubah kehidupan bangsa serta bertanggung jawab". Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. (Rusn, 53:2009)

Pendidikan menurut Al- Ghazali merupakan salah satu upaya untuk membangun dan melatih tingkat pola pikir sumber daya manusia, karena dengan pendidikan manusia diharapkan mampu menemukan dirinya darimana ia berasal, hadir di dunia ini untuk apa dan setelah kehidupan ini akan kemana, sehingga ia menjadi lebih manusiawi, baik itu dalam berfikir, bersikap maupun bertindak. (Rusn, 53:2009).

Pendidikan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dunia terutama di Indonesia ini, bahwasanya seseorang dari ia lahir sudah mendapatkan pendidikan dari orang tuannya, kalau kita lihat Indonesia masih memiliki anak-

anak yang tidak merasakan dunia pendidikan dikarenakan oleh faktor ekonomi yang kurang memadai sehingga orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk bersekolah tidak dapat merasakan indahnya ilmu pendidikan seperti yang dirasakan oleh anak-anak yang orang tuannya mampu membiayai anaknya sekolah. Begitu banyak anak-anak yang tidak mampu yang ingin bersekolah yang lebih semangat ingin bersekolah namun memutuskan bekerja membantu perekonomian orang tuanya, banyak kita temukan di Indonesia ini anak-anak yang berjualan di jalanan yang seharusnya di usianya itu harus masih bersekolah namun secara ikhlas memutuskan untuk berjualan demi menyambung kehidupan dan kebutuhan orang tuannya.

Begitu juga dengan anak-anak desa, di daerah pegunungan yang masih minim dengan akses jalan, bangunan sekolah yang seadanya, akses jaringan internet yang perlu perhatian dari pemerintah yang tidak hanya mementingkan kebutuhan dikota saja, sehingga masyarakat dikota dan desa mampu merasakan hal yang sama. Pendidikan di pelosok juga masih perlu akses jaringan yang memadai sehingga tidak ada terjadi keluhan terhadap pelajar, terutama pada masa saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia sedang memerangi covid-19 yang berdampak secara luas tidak hanya di bidang sosial, ekonomi, kehidupan beragama, kesehatan tetapi juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu bila kita lihat dampak-dampak yang terjadi terutama di dunia pendidikan yaitu tidak maksimalnya proses belajar mengajar terhadap pelajar dan kemudian adanya ketakutan secara masal di siswa-siswi bertemu dengan teman atau gurunya atau

sebaliknya guru bertemu dengan siswa-siswinya oleh karena itu hal ini perlunya suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Wabah covid-19 ini memang membuat dampak perubahan yang sangat besar terhadap dunia pendidikan yang dimana tadinya sekolah sebagai rumah tempat mendapatkan ilmu secara langsung dari guru karna ilmu secara tatap muka lebih berkah apabila kita menekuni apa yang disampaikan, namun kini pembelajaran dilakakukan secara daring melalui internet yang sekarang di sebut E-Learning, pembelajaran melalui daring.

Pendidikan di masa pandemi merupakan sector yang paling luas dalam melakukan adaptasi dan melaksanakan pelayanan belajar mengajar, guru sebagai pendidik harus tetap berupaya melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan terus dapat memberikan pelajaran dengan menggunakan sarana prasarana yang berbeda dan menyikapi karakteristik para peserta didik yang beragam sifatnya.

Pembelajaran yang dulu dengan tatap muka dapat bertukar pikiran dengan kawan sebangku kini tidak dapat kita rasakan lagi setelah mewabahnya covid-19 ini, pembelajaran kini terlaksana dari rumah dengan media daring pembelajaran jarak jauh dengan didampingi oleh guru pertama yaitu orang tua. Pembelajaran melalui E-Learning mungkin suatu hal yang baru bagi pelajar dan guru yang mungkin belum pernah mencoba terutama didesa yang mungkin sangat sulit akses jaringannya, namun dengan keadaanya yang seperti ini pelajar dan guru mau tidak mau harus bisa menggunakan media E-Learning tersebut di tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka demi berjalannya proses belajar mengajar.



Dulu mungkin hp (handphone) hanya sekedar dilakukan untuk alat komunikasi semata namun sekarang kondisi merubah semua itu menjadikan hp sebagai alat pendukung media pembelajaran, yang dulunya ketika di sekolah tidak boleh membawa hp, kini sangat diperlukan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh melalui daring, dan pada akhirnya kondisi yang memaksa para guru dan pelajar untuk belajar melalui internet. Pembelajaran daring ini tentu membuat efek yang begitu tinggi terhadap aktivitas pembelajaran yang dimana guru dan pelajar harus membuat aturan baru seperti kesepakatan mulai dari pembuatan grup di WhatsApp, jam pembelajaran di mulai jam sekian dan selesai sampai jam sekian belum lagi sinyal jaringan yang belum tentu mampu memadai berjalannya proses belajar-mengajar.

Selain itu para pelajar tentunya harus memiliki motivasi belajar yang baik demi berjalannya suatu pembelajaran, sebab proses belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik, oleh karena itu motivasi belajar sangatlah penting dimiliki oleh semua peserta didik. Begitu pula dengan Susana belajar yang dilaksanakan secara daring sangat mempengaruhi peserta didik dalam motivasi belajarnya. Itulah sebabnya guru pasti merasa kesulitan dalam mengontrol dan menjaga suasana belajar peserta didik dan ini menyebabkan menurun nya motivasi belajar dan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan secara umum dapat dinilai dari pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang dapat bertanggung jawab atas segala tugas-tugas kemanusiaan dan tugas-tugas ketuhanan dan juga lebih-lebih bermanfaat baik lagi untuk dirinya sendiri maupun

orang lain, itulah sebab pendidikan dikatakan berhasil. Sebaliknya apabila tidak mampu melaksanakan tugas hidupnya maka pendidikan tersebut mengalami kegagalan.

Walaupun demikian tentu dibutuhkannya pencarian pengetahuan pembelajaran agar pembelajaran melalui daring ini tetap berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang di inginkan tentunya. Walaupun hasilnya berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara online dan tatap muka namun setidaknya sudah berusaha untuk tetap mempertahankan dan membangkitkan motivasi belajar para pelajar agar tetap semangat dalam menimba ilmu di masa pandemi covid-19.

Disamping itu para pelajar juga membutuhkan kuota internet agar mampu mengakses informasi pelajaran yang diberikan oleh gurunya walaupun pemerintah telah memberikan kuota gratis kepada seluruh pelajar namun kuota tersebut hanya dapat dilakukan untuk pembelajaran daring, banyak keluhan dari pelajar yang tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya melalui daring sehingga para pelajar membutuhkan akses internet yang dapat mengakses google untuk mencari jurnal atau artikel pelajaran yang berkaitan dengan apa yang disampaikan gurunya dalam pembelajaran daring. Sehingga pelajar membeli lagi kuota internet yang dapat mengakses google untuk mencari pelajarannya.

Namun dalam hal ini perlunya dampingan orang tua agar bisa mengontrol anaknya agar menggunakan hp dengan seperlunya saja untuk menggunakan hp sebagai belajar di masa pandemi covid-19 ini. Namun terkadang orang tua lalai dan tanpa sepengetahuan anaknya berlebihan menggunakan hp untuk bermain game sehingga lupa dengan PR (pekerjaan rumah) yang telah di berikan oleh

gurunya. Sehingga terkadang peserta didik mengerjakan tugasnya di malam hari dan merasa ngantuk saat mengerjakan akibat kecapekan bermain dan tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu..

Andai saja pemerintah memerintahkan, apabila guru memberikan tugas pada pagi harinya kemudian memberi peringatan kepada siswanya akan di periksa hari ini dengan mendatangi muridnya disetiap rumah pasti para pelajar tidak menunda-nunda tugasnya, sehingga walaupun pembelajaran melalui daring namun kedisiplinan para pelajar tetap terjaga, karena kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Suatu kebijakan yang sudah dibuat tentu harus diimplementasikan, Bagaimanapun baiknya kebijakan, apabila tidak diikuti oleh implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan karena tidak akan berpengaruh apa pun terhadap permasalahan yang dihadapi (Anggara, 2017).

Pelaksanaan kebijakan pemerintah menuntut diadakannya tata cara dan keserasian agar pelaksanaan dapat berjalan dengan daya guna dan hasil guna yang optimal. Akan tetapi, dalam praktik, suatu kebijakan tidak selalu dilaksanakan dengan rapi. Bila tiba pada saat pelaksanaan, kebijakan itu harus disesuaikan lagi, umpamanya karena kebijakan dirumuskan terlalu umum, sarana tidak dapat diperoleh pada waktunya dan faktor waktu dipilih terlalu optimis, semua itu berdasarkan gambaran situasi yang kurang lengkap (Anggara, 2017). Pada masa

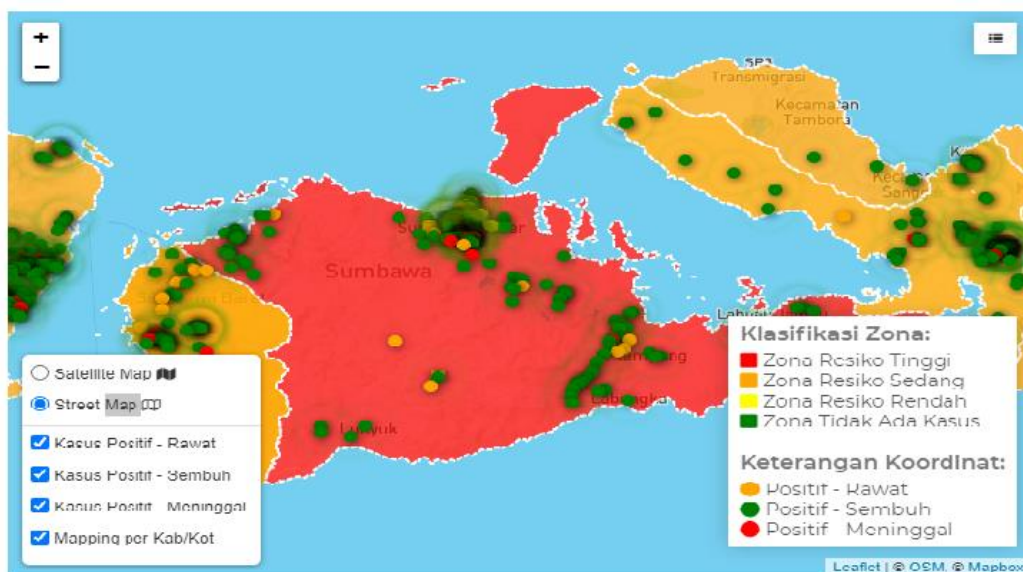
pandemi covid-19, pemerintah membuat suatu kebijakan dalam memberlakukan status pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan yang dibuat dalam praturan pemerintah pada surat edaran nomer 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid-19) menyatakan bahwa status pendidikan di masa pandemi dilakukan dari rumah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan Dikbud NTB dalam memberlakukan status pendidikan di masa pandemi tidak memperkenankan memberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sebab proses pengambilan keputusan ini dilakukan secara sangat ketat, sebab kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat tetap jadi prioritas. Namun pelaksanaan kebijakan yang diterapkan Dikbud NTB kurang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebab di Lombok NTB ini menzona merahkan keseluruhan status pendidikan yang ada di NTB. Sehingga wilayah yang statusnya zona hijau dan seharusnya dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Walaupun pemerintah Dikbud NTB telah menerapkan kebijakan pemerintah, akan tetapi masih ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sekolah-sekolah di desa, pondok pesantren, karena tidak memungkinkan akan melaksanakan proses belajar mengajar melalui daring sebab akan mempengaruhi cara belajar mengajar para pendidik, kebanyakan hanya di kota saja pembelajaran daring di lakukan. Berdasarkan hal diatas maka implementasi kebijakan pendidikan yang di terapkan di NTB belum maksimal



karena menzona merahkan keseluruhan elemen suatu wilayah yang mengakibatkan pelanggaran dalam suatu kebijakan. Pasti ada pelanggaran yang akan terjadi namun apabila pemerintah NTB menerapkan kebijakan yang di keluarkan oleh Kemendikbud tentang membolehkan pelajaran tatap muka bagi wilayah yang berada di zona hijau namun tetap menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menyiapkan hansanitizer di setiap pintu masuk dan tempat lainnya dan memberikan guru khusus di setiap desa yang berada dalam zona hijau dan melakukan proses belajar di tempat yang luas seperti balai desa atau mushola. Sebab belum tentu juga wilayah yang dikatakan zona yang tidak aman di katakan tidak aman, inilah sebenarnya bagaimana peran pemerintah itu agar tidak terlalu melebih-lebihkan informasi yang mengakibatkan masyarakat resah terhadap implementasi kebijakan yang disampaikan oleh masyarakat yang awam sehingga mengakibatkan kepanikan yang menyebabkan imun masyarakat melemah penuh ketegangan.



Tabel 1. Sumber: Diskominfotik NTB (Gugus Tugas Covid-19 – Provinsi NTB)

Tabel 2. Data Covid Tanggal 06 Januari 2021

\*Update Terakhir 06 Januari 2021 22:49

KABUPATEN	PELAKU PISALANAN			KONTAK ERAT			KASUS SUSPEK				KONFIRMASI				
	MASIH KADANTRA	DISCARDED	JUMLAH	MASIH KADANTRA	DISCARDED	JUMLAH	MASIH ISOLASI	PROBABLE		DISCARDED	JUMLAH	MASIH ISOLASI	SEMBUH	MENINGGAL	JUMLAH
								JUMLAH	MEMINGGAL						
Kota Mataram	0	2583	2583	52	8922	8974	4	0	0	2090	2094	59 +8	1264 +4	96 +0	1435
Kabupaten Lombok Barat	3	4329	4332	379	5922	6301	107	0	0	3045	3152	27 +4	693 +0	50 +0	770
Kabupaten Lombok Tengah	0	17720	17720	70	4854	4824	8	1	0	926	935	23 +2	243 +1	18 +0	304
Kabupaten Lombok Utara	0	1079	1079	4	1029	1033	0	0	0	754	754	3 +0	128 +0	8 +0	137
Kabupaten Lombok Timur	93	18132	18225	805	5977	6082	40	63	0	3844	3947	41 +2	651 +6	28 +0	720
Kabupaten Sumbawa Barat	727	12960	13687	201	1233	1424	0	2	0	196	198	34 +0	186 +2	3 +0	223
Kabupaten Sumbawa	1	10074	10075	141	2866	3007	37	0	0	983	1020	142 +16	493 +8	50 +0	788
Kabupaten Dompu	172	19077	20249	74	4059	4173	86	0	0	818	904	40 +10	383 +0	17 +0	440
Kabupaten Bima	262	10081	12343	508	4812	5300	19	0	0	1013	1032	67 +1	280 +0	0 +0	368
Kota Bima	4	3436	3440	57	5772	5229	10	0	0	275	285	36 +9	440 +2	17 +0	353
WNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	1 +0	4 +0	0 +0	5
Luar Provinsi	0	10389	10389	0	0	0	0	0	0	1	1	10 +8	103 +0	0 +0	213
<b>JUMLAH</b>	<b>2362</b>	<b>106439</b>	<b>108701</b>	<b>2031</b>	<b>44646</b>	<b>46077</b>	<b>312</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>13961</b>	<b>14338</b>	<b>777</b>	<b>4089</b>	<b>286</b>	<b>5961</b>

Sumber DISKOMINFOTIK NTB

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan di masa pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka, melainkan harus dilakukan secara daring. Disamping itu para pendidik harus tetap memberi pelajaran dengan memberikan motivasi belajar agar pelajar tetap semangat menjalankan pelajaran meskipun melalui daring.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Implementasi kebijakan pendidikan No 4 tahun 2020 pada masa pandemic covid-19 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat tahun 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Proses Formulasi kebijakan pendidikan berdasarkan surat Edaran No 4 Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 di Dikbud NTB.?
- 1.2.2 Apa saja faktor penghambat Implementasi kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 di Dikbud NTB.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Proses Formulasi kebijakan pendidikan berdasarkan surat Edaran No 4 Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 di Dikbud NTB
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 di Dikbud NTB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

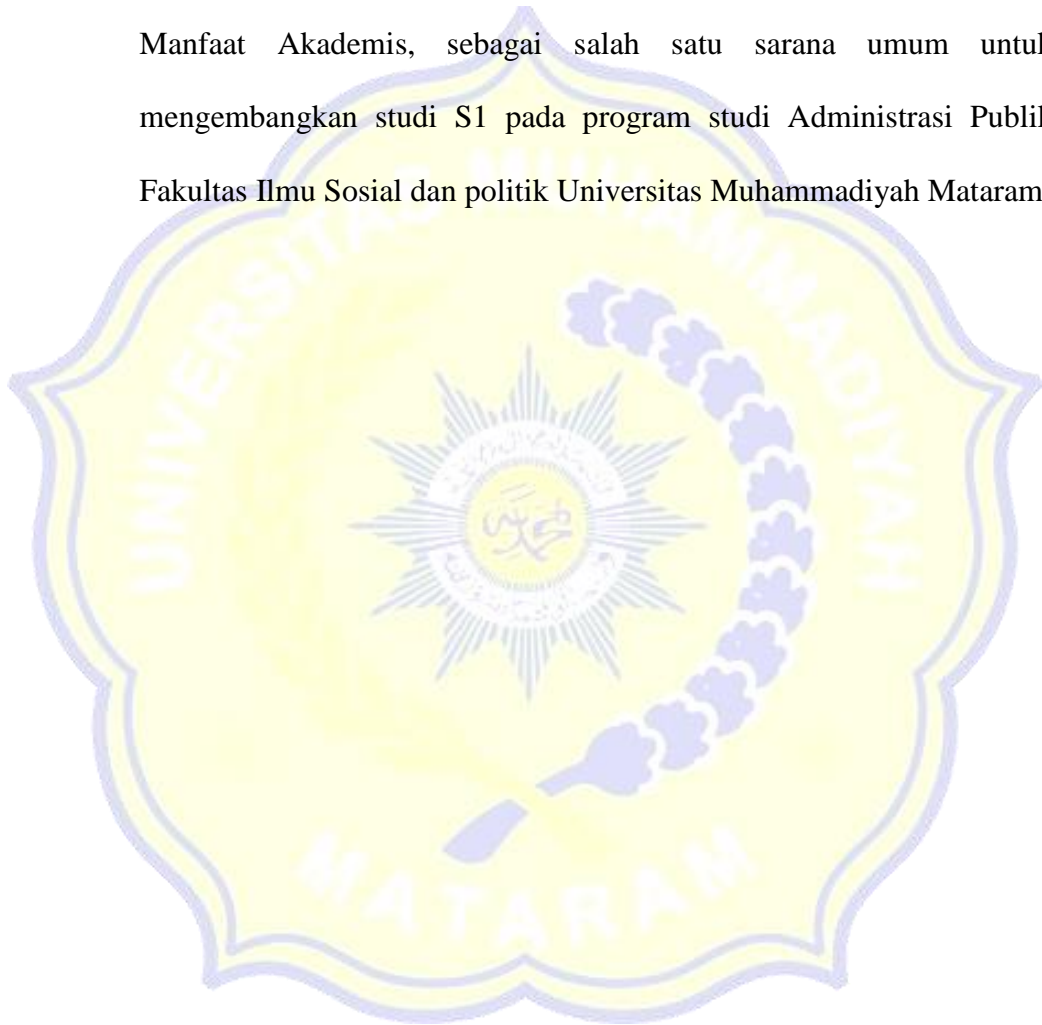
Secara teoritis bertujuan sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah yang sama, serta juga untuk menambah literatur bagi kalangan akademis terkait Implementasi kebijakan pendidikan pemerintah indonesia di masa pandemi Covid-19.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan saran pada instansi sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan menyusun program terkait dengan pendidikan.

#### **1.4.3 Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis, sebagai salah satu sarana umum untuk mengembangkan studi S1 pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram.





**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Judul Data</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1</b>	Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis E-Learning (Studi Inovasi Pendidik MTS.Pai Medan Di Tengah Wabah Covid-19	Masruroh Lubis1, Dairina Yusri1, Media Gusman2	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kebijakan terkait dengan pembelajaran jarak jauh selama masa darurat Covid-19, 2) Ragam inovasi pembelajaran yang diterapkan guru PAI, 3) hambatan yang dihadapi oleh Guru pendididkan Agama Islam selama pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini dilaksanakan di MTS. Pendidikan Agama Islam. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, dengan model studi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di MTS. Pendidikan Agama Islam Selama Masa darurat Covid-19 ialah tetap melaksanakan pembelajaran, namun dilaksanakan dengan sistem jarak jauh berbasis jaringan internet. Kebijakan ini selalu diterapkan dengan mengikut aturan pemerintah. Ragam inovasi pembelajaran yang diterapkan ialah 1) Inovasi Pada kegiatan intrakurikuler, diantaranya seperti penyajian pembelajaran dengan multimedia. Pembelajaran PAI yang menekankan moto 'friendly'. Diskusi dan penugasan berbasis online, Penerapan metode berbasis

			<p>proyek, evaluasi pembelajaran berbasis pada kegiatan. 2) Inovasi pada kegiatan Ekstraurikuler, seperti rutinitas membaca dan menghafal Alquran. Adapun hambatan yang dihadapi ialah 1) kesalahan mindset, 2) Minimya kompetensi, 3) ketidaksiapan guru dan siswa dalam menghadapi pembelajaran E-Learning.</p>
2	<p>Motivasi Belajar Siswa SMA pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Adhetya Cahyani<sup>1</sup>, Iin Diah Listiana<sup>2</sup>, Sari Puteri Deta Larasati<sup>3</sup></p>	<p>Sistem pendidikan di Indonesia sedang mengalami tantangan baru yang disebabkan karena adanya wabah virus Covid-19, yang menyebabkan seluruh sistem pembelajaran di lembaga pendidikan dialihkan kepada metode pembelajaran <i>online</i> atau dalam jaringan (daring). Adanya gangguan dalam proses pembelajaran menyebabkan terjadinya beberapa perubahan terhadap peserta didik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap motivasi belajarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik sampling yang digunakan adalah <i>accidental sampling</i>. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA yang mengikuti proses pembelajaran dengan sistem <i>online</i> atau daring. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode analisis <i>Mann Whitney U</i>. Jenis penelitian ini menggunakan landasan teori motivasi belajar dan aspek-aspek dari teori</p>

			Chernis & Goleman (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi <i>Mann Whitney U</i> sebesar 0,000 yang artinya motivasi belajar pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring atau <i>online</i> di tengah situasi pandemik virus Covid-19 ini menurun, karena nilai signifikansi yaitu 0,000 adalah kurang dari 0,05 ( $p < 0,05$ ).
3	Implementasi Pembelajaran Secara Daring Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat Smp Di Masa Pandemic Covid-19	Wati Susanti	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, proses pelaksanaan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah yang dalam hal ini adalah tenaga pendidik termasuk orang tua dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran PAI di masa covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, analisis data dilakukan dengan cara menyusun data, mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan. Sesuai dengan hasil penelitian diketahui bahwa guru dalam merencanakan pembelajaran daring dihadapkan pada homogenitas peserta didik baik dari level ekonomis, inteligensi bahkan tempat tinggal, sehingga apa yang direncanakan tidak

			<p>terlaksana secara maksimal, sementara pelaksanaan pembelajaran daring lebih didominasi pada pemanfaatan media WhatsApp group, kendala yang dihadapi guru terkait dengan pembelajaran PAI yang bersifat praktik sulit untuk dipahami peserta didik, begitu juga dengan materi akhlak yang tidak dapat diajarkan melalui keteladanan karena hanya menggunakan media online.</p>
4	<p>Kesenjangan Kualitas Layanan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Darurat Covid-19: Telaah Demografi Atas Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah</p>	<p>Indah Pratiwi1, Bakti Utama2</p>	<p><i>One of the effects of the COVID-19 pandemic on the education sector in Indonesia is the closure of schools. To ensure education services continue, the government issued a policy of learning home (Belajar dari Rumah/BDR) through online/distance learning. This paper aims to describe the implementation of the BDR for learning quality. To that aim, we have conducted telephone interviews with school principals and teachers from frontier, outermost and remote regions (3T) and non-3T regions. By looking at demographics perspective, implementation of BDR has six variations are a) learning by interactive virtual classroom b) learning assignment by social media c) learning in teacher's or student's home d) learning by using TV/radio e) learning by 'mouth-to-mouth' messages and f) learning stopped. The variations generate different quality of learning and will</i></p>



			<i>produce an increasing education inequality in Indonesia.</i>
5	Potret Pendidikan di Tahun Pandemi: Dampak COVID-19 Terhadap Disparitas Pendidikan di Indonesia	Ari Budi Santosa	Kebijakan “belajar dari rumah” sebagai respons dari pandemi COVID-19 memiliki dampak serius kepada 68 juta siswa dan 3,2 juta guru.1 Pembelajaran jarak jauh (PJJ) berisiko menghambat bahkan menghentikan proses pembelajaran bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil karena keterbatasan akses internet dan biaya yang harus dikeluarkan setiap murid. Sekolah dan murid-murid yang tidak memiliki fasilitas memadai mengalami kesulitan melanjutkan proses belajar-mengajar. Hal tersebut berpotensi meningkatkan disparitas atau ketimpangan pendidikan di Indonesia. Kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia sedang mendiskusikan berbagai kebijakan

*Tabel 3. Penelitian Terdahulu*

Terkait dengan penelitian diatas bahwa, pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan internet atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai surat edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020.

Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai yang diinginkan pemerintah namun ada permasalahannya mengenai berkurangnya motivasi belajar dan menurunnya prestasi pelajar dalam memahami pembelajaran melalui daring.

Sedangkan dalam penelitian saya membahas bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pada masa pandemic covid-19 di Dikbud NTB karena menzona merahkan keseluruhan wilayah pendidikan yang belum tentu di wilayah tersebut berada dalam zona merah, sehingga menghambat status pendidikan dalam proses pembelajaran di masa pandemi.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Mengenai pengertian kebijakan ini, Dunn (dalam Anggara, 2016:499) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan.

Agar Pengertian tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif, perhatikan penjelasan Singadilaga (dalam Anggara, 2016:499) berikut ini.

1. Kebijakan public, yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing*) yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
2. Pelaku kebijakan, adalah orang, sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu dalam kebijakan sebab mereka berada dalam posisi memengaruhi, baik pada perumusan

kebijakan, pembuatan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan penilaian atas perkembangan pelaksanaannya.

3. Lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatarbelakangi atau kejadian yang menyebabkan timbulnya sesuatu *issues* atau masalah kebijakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Pada konteks lain, Islamy (dalam Anggara, 2016:501) mengemukakan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dalam pengertian Islamy (dalam Anggara, 2016:501) terdapat empat pengertian tentang kebijakan public, yaitu:

1. Kebijakan public dalam bentuk perdanaannya berupa penetapan tindakan pemerintah;
2. Kebijakan public tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk nyata;
3. Kebijakan public baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. Kebijakan public harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari berbagai pandangan tentang pengertian kebijakan public, menurut Santoso (dalam Anggara, 2016:502) tidak ada satu pun definisi yang

dapat memuaskan. Ini dikarenakan banyak definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seseorang analisis kebijakan, dan oleh pendekatan serta model yang digunakan. Santoso (dalam Anggara, 2016:502) mengemukakan dua pandangan yang dapat menjelaskan konsep kebijakan public, yaitu:

- a. Kebijakan public diidentifikasi dengan tindakan-tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan public.
- b. Kebijakan public lebih memberikan penekanan atau perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Dalam pandangan ini terdapat dua kubu, yaitu kelompok yang memandang kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu dan kelompok lainnya yang menganggap kebijakan public sebagai akibat yang biasa diramalkan.

Poerwadarminta (dalam Anggara, 2016:502) mengartikan “kebijakan” berasal dari kata *bijak* yang berarti pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya; petah lidah dan pandai bercakap-cakap. Dengan demikian, secara harfiah, kebijakan berarti kepandaian atau kemahiran, sedangkan kata “kebijaksanaan” berasal dari kata *bijaksana* yang berarti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), tajam pikiran, pandai dan ingat-ingat, cara pimpinan dan bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya), dan kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).



Lembaga Administrasi Negara (LAN) (dalam Anggara, 2016:503) memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. LAN mengemukakan bahwa kebijakan dapat dibedakan, yaitu kebijakan internal dan eksternal, serta tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan internal (kebijakan manajerial), yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri. Adapun kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan public).

Berdasarkan pengertian di atas, pada hakikatnya, kebijakan merupakan kajian terhadap peraturan atau program dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu dihubungkan dengan upaya penyelesaian masalah. Islamy (dalam Anggara, 2016:503) mengemukakan konsep bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik tau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Pendapat tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan public mulai memegang peranan dalam setiap kajian ilmu administrasi negara. Semenjak

administrasi negara mempunyai sikap yang berorientasi pada aplikasi, studi ini mempunyai perhatian yang khusus terhadap kebijakan public. Ketika pertikaian dikotomi administrasi politik mulai ditinggalkan, analisi yang sungguh-sungguh terhadap perumusan kebijakan mulai dibangkitkan. Pada saat itulah, disiplin ilmu administrasi negara mengembangkan literature yang memberikan perhatian terhadap peroses perumusan kebijakan publik.

Keterkaitan antara administrasi negara dan kebijakan public sangat jelas terlihat pada perkembangan paradigma administrasi negara, khususnya paradigma kelima, yang terakhir setelah tahun 1970. Thoha (dalam Anggara, 2016:506) menjelaskan bahwa paradigma administrasi negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah ilmu kebijakn, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya, dan cara-cara pengukuran dari hasil-hasil kebijakan yang telah dibuat.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (LAN RI dalam Anggara, 2016:506). Menurut Anderson (dalam Anggara, 2016:507), implikasi dari pengertian kebijakan public adalah:

1. Kebijakan selalu memiliki tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;

2. Kebijakan public berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Kebijakan public merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi, bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
4. Kebijakan public bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan public dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*autoratif*).

Dihubungkan dengan organisasi, Siagian (dalam Anggara, 2016:508) mengatakan bahwa kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal-hal yang menilainya strategis ditinjau dari sudut kepentingan organisasi yang ada pada gilirannya memungkinkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan baginya.

Definisi-definisi ini menggambarkan bahwa istilah kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan karena kebijakan merupakan hasil pemilihan dari sejumlah alternative. Selain itu, kebijakan dipandang sebagai suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks kebijakan public, muncul dua pandangan. Pandangan pertama, pendapat yang mengidentikkan kebijakan public sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan public. Sehubungan dengan hal ini, seorang ahli analisi kebijakan, Parker (dalam Anggara, 2016:509) mengatakan bahwa kebijakan public merupakan tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subjek atau sebagai tanggapan terhadap suatu krisis.

Apa pun masalahnya, kebijakan public yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap warga masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Udoji dikutip Wahab (dalam Anggara, 2016:510) yang merumuskan kebijakan public sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Hal yang sama ditegaskan Hoogerwerf (dalam Anggara, 2016:510) yang mengemukakan bahwa tujuan-tujuan penting dari kebijakan public pada umumnya adalah:

1. Memelihara ketertiban umum;
2. Memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal;
3. Memperpadukan berbagai aktifitas;
4. Menunjuk dan membagi berbagai benda material dan nonmaterial.



Berdasarkan pandangan tersebut, terlihat bahwa tujuan sentral dari suatu kebijakan pemerintah adalah kepentingan umum (public). Pembentukan kebijakan dapat dilakukan secara demokrasi, dalam pengertian anggota dan suatu kelompok mendapat kesempatan untuk memengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap isi terjadinya dan akibat dari suatu kebijakan public. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijakan public ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan umum yang di dalam prosesnya melibatkan berbagai faktor seiring dengan pemenuhan tuntutan yang dihadapi dan kompleksitas permasalahan yang harus diantisipasi dalam suatu kebijakan publik.

### **Model-Model Kebijakan Publik**

Administrasi negara saat ini mempunyai arti lebih dari sekadar pengertiannya yang tradisional. Para ahli administrasi negara telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, bidang kajian yang menjadi perhatian utama dari administrasi negara adalah kebijakan public. Bidang kajian ini sangat penting bagi administrasi negara. Selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, kebijakan public dapat pula digunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah.

Untuk lebih memahami kebijakan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model kebijakan. Dunn (dalam anggara, 2016:515) mengemukakan bahwa model kebijakan adalah representasi

sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik atau persamaan matematika. Lebih lanjut, Dunn (dalam Anggara, 2016:515) menjelaskan bahwa model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan mengurangi kompleksitas.

Model-model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, dari yang paling penting di antaranya membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi, dan fungsi metodologis dari model. Dunn (dalam Anggara, 2016:516) mengemukakan model-model kebijakan sebagai berikut.

1. Model deskriptif: Tujuannya adalah menjelaskan dan/ atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi kebijakan.
2. Model normatif: Tujuan model ini bukan hanya untuk menjelaskan dan/ atau memprediksi, tapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Model ini tidak hanya berguna dalam memperkirakan nilai-nilai masalah, masa kini, dan masa yang akan datang dari variable-variable hasil, tetapi juga dalam mengoptimalkan pencapaian suatu nilai.
3. Model verbal: Model ini diekspresikan dalam bahasan sehari-hari, bukannya bahasa logika symbol dari matematika seperti bagian

dari model-model. Penggunaan model verbal bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar mengharamkan kebijakan, bukan dalam bentuk nilai-nilai antik pasti.

4. Model simbolis: Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variable-variable kunci yang dipercaya merupakan ciri suatu masalah. Prediksi/atau solusi yang optimal diperoleh dengan meminjam metode-metode matematika, statistika, dan logika. Model ini sulit dikomunikasikan, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman.
5. Model procedural: Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variable-variable yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan menyimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin. Prosedur simulasi dan penelitian pada umumnya diperoleh dengan bantuan computer, yang deprogram untuk menghasilkan prediksi-prediksi alternative dari asumsi yang berbed.
6. Model pengganti dan prespektif: Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantive, yang dimulai dari asumsi bahwa masalah formal adalah refresentasi yang sah dari dari masalah substantif. Model prespektif digunakan untuk merumuskan masalah substantif, yang didasarkan pada asumsi

bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model-model kebijakan adalah penyederhanaan representasi aspek-aspek kondisi masalah yang terseleksi. Penggunaannya bukan masalah pilihan, melainkan secara selektif menyederhanakan situasi dan kondisi masalah.

Singadilaga (dalam Anggara, 2016:517) menjelaskan bahwa semua hal di atas bergantung pada sistem politik, pemerintahan, dan ekonomi, dan jenis kebijakan serta bentuk organisasi pengambil keputusan. Artinya, jika keputusan diambil oleh aparatur public pada hierarki organisasi dan kewenangan tertentu, dengan diterbitkannya keputusan berarti adanya kekuatan memikat terhadap objek dan subjek kebijakan tersebut untuk menaatinya.

### **2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, Wahab (dalam Anggara, 2012:530) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.



Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai, dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari bidang kajian kebijakan public.

Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab (dalam Anggara, 2012:530) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama.

Lebih lanjut, Mazmanian (dalam Anggara, 2012:532) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan pengadilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

### 2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan public terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan public Van Mater Dan Van Horn (1975), Edward III (1980), Grindle (1980), dan Mazmanian dan Sabitier (1987).

Model Edward III dalam Widodo (2018:96) mengajukan empat faktor atau variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variable atau faktor tadi antara lain meliputi variable atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*.

#### 1. Faktor komunikasi (Communication)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).

#### 2. Sumber Daya (*Resources*)

Edward (dalam widodo,2018:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward (dalam Widodo,2018:98) menegaskan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber

daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya peralatan seperti gedung, tanah dan suku cadang lain. Yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variable yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam widodo (2018:98) menegaskan bahwa “*probably the most essential resource in implementing policy is staff*”. Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian).

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai oprasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Sebab apabila terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada public yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk oprasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan Edward III (dalam Widodo, 2018:102).

d. Sumber Daya Informasi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijaksanaan tersebut. Disamping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar di antara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

3. Disposisi (Disposition)

Edward III (dalam Widodo, 2018:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para



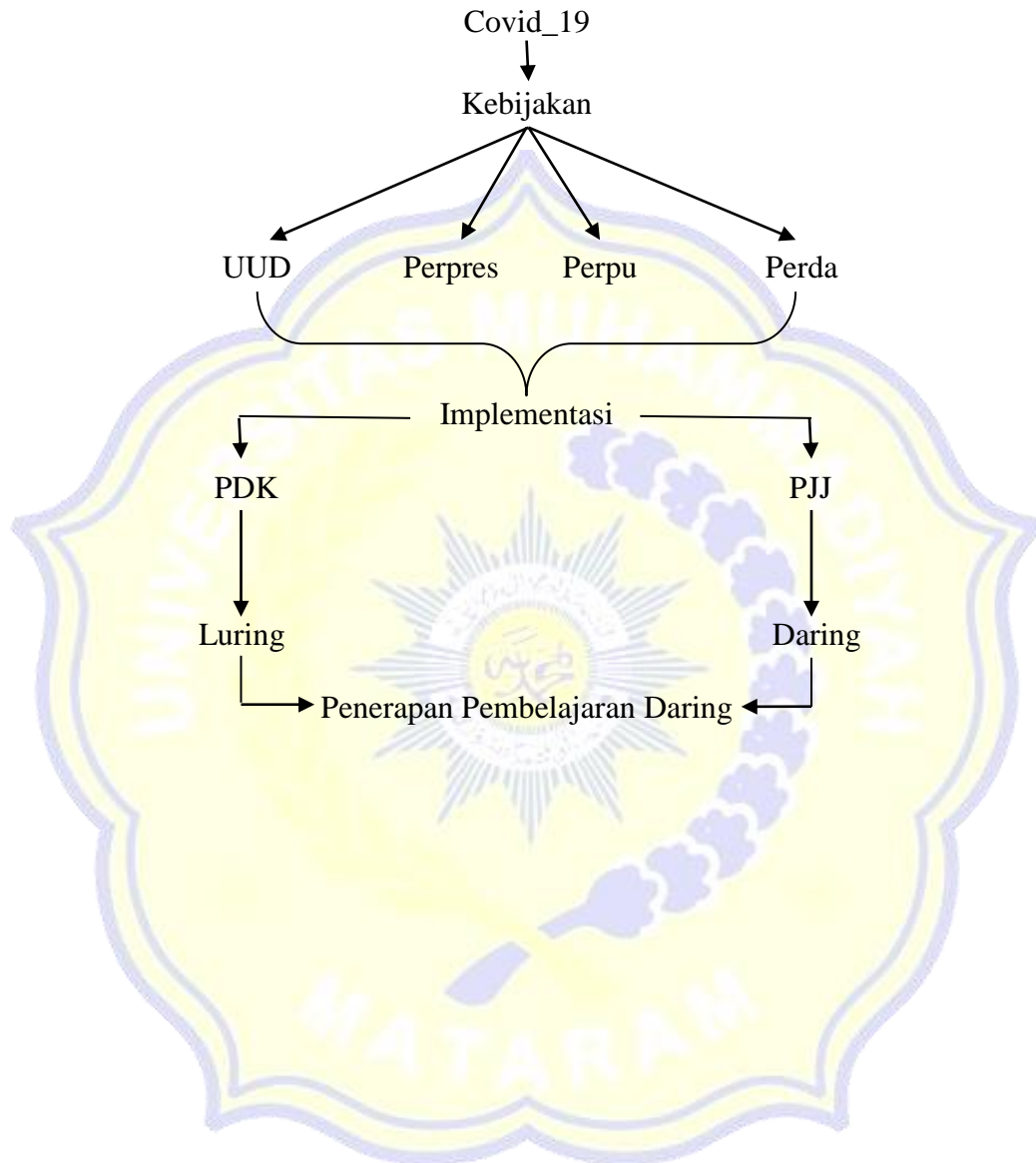
pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementators*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun menurut Edward (dalam Widodo, 2018:106), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka. Adanya perubahan yang menciptakan kegaduhan, kebingungan, yang semua itu akan mengarah

pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 2.3 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang secara aktif dalam pengumpulan data, yaitu secara langsung menemui institusi tempat penelitian. Dalam konteks ini peneliti menggambarkan Implementasi Kebijakan Pendidikan No 4 Pada Masa Pandemi Covid-19 di DIKBUD NTB.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dikbud NTB kota mataram.

##### **3.2.2 Waktu penelitian**

penelitian ini dilakukan pada tahun 2020/2021 di dikbud NTB

#### **3.3 Pemilihan Informan**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari Edward III. Informan dibagi menjadi tiga, yaitu informan ahli, informan kunci, dan informan pendukung. Adapun informan ini ditentukan dengan snowball sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data yang didapatkan dari orang pertama yang kemudian menyebar menjadi jumlah sample yang semakin banyak.

Dalam hal ini peneliti, pihak yang akan di jadikan narasumber salah satunya pengelola program kebijakan pemerintah serta pihak lain yang dianggap terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan data primer dan sekunder.

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**

Menurut Moleong (2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengalaman lain, data tambahan dari sumber tertulis seperti dokumen resmi, sumber arsip, majalah ilmiah, dokumen tertulis resmi, dan termasuk studi pustaka.

Berkaitan dengan ini peneliti menggunakan data sebagai berikut :

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Disamping menggunakan penelitian yang berkaitan mengadakan wawancara dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan persoalan penelitian sehingga memperoleh informasi yang mendalam. Peneliti melakukan wawancara sesuai panduan wawancara yang sudah disiapkan.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. data yang tertulis yang bersumber dari data dokumen-dokumen disebut dokumenter, yaitu data berupa gambaran tentang lokasi penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberlakukan status pendidikan dimasa pandemic.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian diperoleh dengan tiga cara yaitu :



a. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, sehingga memperoleh data dan informasi terkait tentang pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberlakukan status pendidikan dimasa pandemic.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau melihat peristiwa yang timbul, berkaitan dengan apa yang diteliti secara langsung yang sesuai dengan yang diteliti sehingga menemukan apa yang menjadi pokok permasalahannya.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data-data yang diteliti, dalam teknik ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberlakukan status pendidikan dimasa pandemic., foto kegiatan kebijakan pemerintah dan apa saja yang terkait dengan permasalahan tersebut.

### **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisis data dilakukan peneliti yaitu dengan mengorganisasikan data , menyusun ke dalam pola yang sudah ditentukan, memilih yang penting yang akan dipelajari dibuktikan dengan data yang diperoleh dilapangan ketika melakukan wawancara dan observasi dilapangan sesuai kebutuhan. Peneliti menjelaskan dan

menguraikan data yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk menjawab semua permasalahannya.

### 3.7 Uji Validitas Data

Dalam Sugiyono (2015:121-131). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Namun pada kali ini peneliti menggunakan uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan berbagai kegiatan, disini peneliti hanya menggunakan kegiatan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai narasumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

#### a. Analisis Kasus Negatif

*Kasus* negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis *kasus* negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan, tetapi jika peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan temuan maka peneliti akan merubah temuannya.

#### b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti photo-photo, alat perekam data dalam penelitian

kualitatif, seperti camera, handphone, alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

c. Member check

*Member check* adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *Member check* dapat dilakukan setelah satu priode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

